

565

BEBERAPA ASPEK POLITIK LUAR NEGERI RRC

Oct. Ovy NDOUK*

Beberapa tahun terakhir ini dunia menyaksikan suatu babak baru dalam diplomasi RRC. Para pemimpin RRC secara bergantian mulai mengadakan kunjungan ke negara-negara lain. Program modernisasi merupakan salah satu alasan diplomasi RRC itu. Perekonomian RRC, yang sebelumnya didasarkan pada ajaran berdikari Mao, rupanya belum mampu untuk membiayai program itu. Oleh karenanya RRC merasa perlu untuk membuka diri dan mengadakan pendekatan dan menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara industri maju. Pendekatan itu juga dimaksudkan untuk memperoleh sekutu dalam melaksanakan politiknya. Pertentangan ideologis dengan Uni Soviet, masalah perbatasan bersama mereka, semakin besarnya pengaruh Soviet di Vietnam, dan berbagai aktivitas Soviet di berbagai penjuru dunia, sangat mempengaruhi politik luar negeri RRC. Uni Soviet dianggap sebagai ancaman utama terhadap kepentingannya. Dan ancaman ini juga merupakan salah satu sebab pendekatan RRC terhadap AS dan Jepang. Oleh karenanya, dalam kondisi internasional seperti sekarang ini, Beijing mengutamakan tujuan politik luar negerinya untuk menangkal serangan Uni Soviet dan membendung pengaruhnya di seluruh dunia termasuk Vietnam. Tulisan ini mencoba untuk menelaah beberapa aspek politik luar negeri RRC yang dipengaruhi faktor-faktor sengketa dengan Uni Soviet dan program modernisasi, terutama pendekatannya terhadap AS, Jepang dan negara-negara Eropa Barat.

SENKETA DENGAN UNI SOVIET

Setelah diproklamasikan 1 Oktober 1949, RRC yang masih lemah dan belum mampu melaksanakan pembangunannya, merasa perlu untuk mencari

* Staf CSIS

bantuan dan atau hubungan ekonomi dengan luar negeri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis dan ideologis, RRC - yang politik luar negerinya pada saat itu berorientasi ke Moskow - mengandalkan Uni Soviet untuk memberikan bantuan kredit, ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat-alat modal yang dibutuhkan bagi pembangunannya. Selain itu, ketika pecah Perang Korea (1950-1953), RRC yang berpihak pada Korea Utara dalam perang tersebut meminta bantuan senjata juga dari Uni Soviet, agar dapat mengimbangi AS (dari Korea Selatan).

Setelah perang itu berakhir, RRC masih menerima bantuan ekonomi dari Uni Soviet. Akan tetapi, bantuan Uni Soviet itu merupakan beban berat yang harus dibayar mahal, dan RRC agaknya merasa kuatir bahwa ketergantungannya dalam bidang ekonomi akan dapat mempengaruhi atau mengakibatkan ketergantungannya juga dalam bidang politik. Kemungkinan seperti ini akan menjurus kepada suatu keadaan di mana RRC tidak dapat memainkan peranan politiknya secara bebas. Oleh karenanya, RRC berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada Uni Soviet. Kebijakan ini kiranya didukung oleh kepercayaan RRC pada potensi sumber-sumber daya alamnya dan kemampuan rakyatnya untuk dapat berdiri sendiri.

Pertentangan ideologis merupakan masalah utama yang menyebabkan RRC memutuskan hubungan ekonomi dan politik dengan Uni Soviet pada akhir tahun 1950-an. Uni Soviet dituduh sebagai revisionis karena tidak melaksanakan ajaran Marxisme-Leninisme secara konsekuen. Alasannya ialah karena pimpinan Soviet pada waktu itu (Kruschev) melontarkan gagasan hidup berdampingan secara damai (untuk mencegah perang nuklir) dengan negara-negara yang menganut sistem kapitalis, terutama AS. Menurut ajaran tersebut di atas, masyarakat dunia dibagi menjadi kubu komunisme di satu pihak dan kubu kapitalisme di lain pihak. Oleh karenanya, RRC menganggap bahwa dengan melontarkan gagasan tersebut di atas, Uni Soviet telah menyimpang dari ajaran yang menjadi pedoman kebijaksanaan mereka. Selain itu, RRC mungkin juga kuatir akan terjadi persekutuan antara Uni Soviet dan AS untuk menentangnya, karena AS pada waktu itu masih merupakan musuh utama RRC dan belum bersedia untuk menjalin hubungan dengan RRC. Sebaliknya RRC berusaha melaksanakan ajaran Marxisme-Leninisme tersebut secara murni dan konsekuen sesuai dengan ajaran Mao. Kebijakan RRC ini dilakukan dalam usahanya untuk melancarkan pembangunan yang pesat dengan mengerahkan tenaga penduduk baik secara politis maupun ideologis, yang dikenal dengan sebutan Lompatan Jauh ke Depan (1956-1960).¹ Namun usaha ini akhirnya mengalami kegagalan, dan

1 Lihat G.P.H. Djatikusumo, "Perkembangan Keadaan Keamanan Asia 1981", Republik Rakyat Cina (Bgn-II), *Berita Buana*, 11 Mei 1981, hal.12

malahan menyebabkan kemunduran dalam perekonomian RRC. Kemudian muncullah Revolusi Kebudayaan (1966-1976) yang menimbulkan banyak korban.

Selama Revolusi Kebudayaan itu RRC menganggap dirinya sebagai sokoguru revolusi dunia. RRC beranggapan bahwa pengalaman dalam Revolusi Kebudayaan dapat diperluas ke seluruh dunia. Oleh karenanya para pemimpin RRC mencoba menyebarkan revolusi itu antara lain dengan cara mendukung perjuangan pemberontak-pemberontak komunis dan orang-orang Cina perantauan terutama di negara-negara Asia Tenggara.¹ Hal ini menunjukkan ambisi RRC untuk memperluas pengaruhnya dan berusaha mewujudkan cita-citanya untuk bertindak sebagai pemimpin revolusi dunia terutama di antara negara-negara berkembang. Ambisinya ini kiranya merupakan salah satu alasan juga pertentangan RRC dengan Uni Soviet.

Pada tahun 1960-an, pimpinan Beijing menempuh strategi yang dapat dikatakan sebagai dwi-strategi yang berlawanan, yakni perjuangan ideologis, politis dan militer (sampai batas tertentu) yang dilancarkan secara bersamaan untuk menghadapi revisionisme Uni Soviet dan imperialisme Amerika Serikat. Pertentangan ideologis dengan Uni Soviet dan rasa takut terhadap ancaman serangan dari luar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi RRC tersebut di atas. Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman utama sehubungan dengan eskalasi perangnya di Vietnam yang menimbulkan kecemasan bagi RRC terutama karena wilayah bagian selatannya sebagian berbatasan langsung dengan Vietnam. Kecemasan RRC itu rupanya tidak beralasan karena ternyata bahwa AS tidak memperluas perang Vietnam atau mengancam wilayah perbatasan RRC sehingga memungkinkan terjadinya perang Sino-AS. Hal ini sedikit mengurangi rasa takut RRC terhadap ancaman serangan dari luar. Akan tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Uni Soviet rupanya cemas dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di RRC, antara lain ditemukannya senjata atom dan kemudian nuklir, serta Revolusi Kebudayaan. Oleh karenanya, pada tahun 1966 Uni Soviet mengerahkan satuan-satuan militernya secara besar-besaran ke dalam wilayah Mongolia dan bersamaan dengan itu memperkuat angkatan bersenjata di sepanjang perbatasannya dengan RRC. Di samping itu Uni Soviet juga mulai menyiarkan tulisan-tulisan anti Cina melalui harian-harian ideologinya. Kenyataan ini rupanya mencemaskan RRC. Beberapa pemimpin (moderat) RRC mulai mengira bahwa Uni Soviet telah menjadi ancaman utama bagi negaranya menggantikan AS. Dan dengan adanya keputusan Pemerintah AS untuk menurunkan tingkat kehebatan perang di Vietnam dan meningkatkan usaha penyelesaiannya dengan Hanoi memberi gambaran kepada RRC (Cq. PM

1 Lihat Tatsumi Okabe, "The Impacts of Modernization Program on China's Foreign Policy", *The Korean Journal of International Studies*, Vol. XII, No. 3, Summer 1981, hal. 255-256

Zhou En-lai) akan kemungkinan menjalin hubungan anti Soviet di masa mendatang dengan AS, Jepang dan Eropa Barat, serta pusat-pusat kekuatan lainnya.¹ Bagi RRC, keputusan Pemerintah AS tersebut di atas penting artinya terhadap keamanan perbatasannya dengan Vietnam. Usaha AS untuk mengakhiri perang Vietnam berarti akan mengurangi sebagian dari ancaman terhadap negaranya. Selain itu, faktor ancaman Uni Soviet kiranya telah mendorong RRC untuk mulai mempertimbangkan kemungkinan pendekatan dengan AS dan sekutu-sekutunya. Penyerbuan militer Uni Soviet ke Cekoslovakia (Agustus 1968) dan konflik perbatasan RRC - Soviet musim semi 1969 merupakan rangkaian kejadian yang menambah keyakinan RRC akan kemungkinan serangan militer Soviet terhadap RRC.² RRC akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Uni Soviet lebih berbahaya daripada AS. Keyakinan ini menjadi lebih kuat setelah Uni Soviet dan Vietnam menandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama, 3 Nopember 1978. RRC menganggap bahwa Uni Soviet mulai mengepungnya dari perbatasannya bagian selatan, sementara perbatasan bersama mereka tetap rawan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan pemimpin-pemimpin RRC tentang Uni Soviet, dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan dengan negara itu. Sejak akhir 1960-an, RRC berusaha untuk mengadakan perundingan dengan Uni Soviet mengenai sengketa perbatasan kedua negara, tetapi tidak berhasil.³ Pada tahun 1979, kedua negara mengadakan perundingan di Moskow mengenai cara-cara menormalisasi hubungan mereka, tetapi tanpa hasil, dan rencana melanjutkan perundingan itu (di Beijing) dibatalkan ketika RRC memprotes intervensi militer Soviet di Afghanistan, Desember 1979. RRC menganggap tindakan-tindakan Soviet tertentu khususnya invasi militernya ke Afghanistan dan dukungannya terhadap pendudukan Kamboja oleh tentara Vietnam sebagai perintang bagi usaha perbaikan hubungan Moskow-Beijing.⁴ Ditegaskan juga oleh Wakil Ketua Partai Komunis Cina, Deng Xiaoping, kepada wartawan-wartawan Spanyol di Beijing akhir Nopember 1980, bahwa selama kaum hegemonis dan imperialis-sosial Soviet tidak mengubah sikapnya yang agresif dan ekspansionis, maka hubungan RRC - Uni Soviet tidak akan berubah.⁵ Dengan

- 1 Lihat G.P.H. Djatikusumo, "Perkembangan Keadaan Keamanan Asia 1981", Republik Rakyat Cina (Bgn-IV), *Berita Buana*, 14 Mei 1981, hal. 12
- 2 Lihat Yani Sjarifuddin, "Ofensif Diplomatik RRC ke Asia Tenggara", *Sinar Harapan*, 29 Juni 1981, hal. 8; lihat juga Lind D. Dillon et. al., "Who was the Principal Enemy?: Shift in Official Chinese Perceptions of the Superpower, 1968-1969", *Asian Survey*, Vol. XVII, No. 5, Mei 1977, hal. 471-472
- 3 Lihat Yin Ch'ing-yao, "The Peiping-Moskow Relationship and Its Impact on Northeast Asia", *Issues & Studies*, Vol. XVI, No. 3, Maret 1980, hal. 30
- 4 Lihat *Antara*, 11 Nopember 1980
- 5 *Ibid.*, 25 Nopember 1980

demikian hubungan antara dua raksasa komunis itu sulit diperbaiki. Persaingan antara mereka dalam rangka perebutan pengaruh di negara-negara berkembang juga mempersulit usaha ke arah itu. Rangkaian kegiatan militer Soviet beberapa tahun terakhir ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan RRC. Di samping itu RRC menganggap bahwa kegiatan militer Uni Soviet itu dimaksudkan untuk memperluas hegemoninya guna menguasai dunia. Oleh karenanya RRC merasa "berkewajiban" untuk menentangnya - dengan dalih demi perdamaian dan stabilitas dunia - guna mengamankan kepentingannya. Namun RRC kiranya menyadari keterbatasan kemampuannya, sehingga tak ada pilihan lain bagi RRC selain berusaha memperkuat diri dan mencari sahabat yang dapat menunjang pelaksanaan politiknya. Hal ini tampak dari berbagai kebijaksanaan yang dijalankan RRC dalam beberapa tahun terakhir ini, baik di dalam negeri maupun kebijaksanaan luar negerinya.

PENGARUH PROGRAM MODERNISASI PADA POLITIK LUAR NEGERI RRC

Program empat modernisasi (yang meliputi bidang-bidang pertanian, industri, pertahanan nasional serta ilmu pengetahuan dan teknologi) yang dicetuskan oleh PM Zhou En-lai pada tahun 1975, memberi harapan baru bagi perkembangan RRC. Program ini dimaksudkan agar negara itu dapat mencapai status negara yang modern pada akhir abad ke-20 ini. Tetapi tujuan ini tidak akan dapat dicapai tanpa kerja sama dengan negara-negara industri maju (Barat). Namun ketika Zhou En-lai meninggal pada 8 Januari 1976, program tersebut belum dimulai karena ditentang oleh golongan radikal (Mao Cs) sebagai tidak sesuai dengan kemurnian ideologi komunis.

Setelah Mao meninggal, 9 September 1976, Kawan Empat disingkirkan dan Deng Xiaoping direhabilitasi kembali pada tahun 1977 (yang pertama tahun 1973), program empat modernisasi itu dihidupkan lagi. Dengan meninggalkan ajaran berdikari Mao, RRC mulai mencari kredit dan bantuan teknis dari luar negeri dalam jumlah yang besar. Diharapkan bahwa dengan meningkatkan ekspor minyak (cadangan minyak RRC diperkirakan cukup besar) RRC akan dapat membayar kembali hutang-hutangnya itu. Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat merupakan sumber yang baik bagi impor kebutuhan RRC termasuk berbagai jenis teknologi modern. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dan diadakan kerja sama ekonomi maupun perdagangan.

Selama tahun 1978, RRC berusaha untuk mengadakan kerja sama dengan AS, Jepang dan Eropa Barat. Hal ini mengakibatkan perubahan tertentu

dalam teori Tiga Dunia Cina. Menurut teori itu, kedua superpower (AS dan Uni Soviet) tergolong Dunia I; negara-negara kapitalis lainnya seperti negara-negara Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru, tergolong Dunia II; dan negara-negara berkembang, termasuk Cina sendiri, tergolong Dunia III. Dunia I dipandang sebagai imperialis dan karenanya harus dilawan, meskipun imperialisme AS dianggap kurang berbahaya daripada imperialisme-sosial Uni Soviet. Dalam pandangan RRC, AS semakin menjauhi Uni Soviet. Dan ini berarti bahwa AS sedang mengubah posisinya dari Dunia I ke Dunia II. Hal ini penting bagi RRC, karena pendekatan yang dilakukannya terhadap negara-negara Dunia II tidak hanya dimaksud untuk memperoleh bantuan guna pembangunan ekonominya, tetapi juga mencari teman dalam konfrontasinya dengan Uni Soviet.¹

Sebagai negara yang secara ekonomis tergolong negara berkembang, dan yang mengakui masih jauh ketinggalan dari negara-negara besar lainnya, RRC tampaknya kini menjalankan kebijaksanaan yang sesuai dengan posisinya itu. Oleh karenanya program empat modernisasi diprioritaskan, meskipun pelaksanaannya ditangguhkan dan baru dimulai tahun 1981. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan sepuluh tahun yang baru (1981-1990) yang menggabungkan rencana lima tahun (1981-1985) sebelumnya ke dalam rencana baru tersebut. Perubahan ini diumumkan pada sidang Kongres Rakyat Nasional yang berlangsung bulan Agustus-September 1980.²

Sejalan dengan kebijaksanaannya itu, RRC juga melancarkan kampanye diplomasi untuk menghadapi ancaman Uni Soviet terhadap negaranya, disamping untuk memperluas pengaruhnya. Dari rangkaian kebijaksanaannya itu tampak bahwa program modernisasi tersebut mempengaruhi kebijaksanaan luar negerinya dalam beberapa hal. Pertama, RRC kini menginginkan suatu lingkungan internasional yang damai, dalam arti bebas dari konflik. Dalam keadaan seperti itu, RRC akan lebih leluasa melaksanakan program modernisasinya. Kedua, demi program modernisasinya RRC lebih memperkuat hubungannya dengan negara-negara Barat (khususnya AS dan Masyarakat Eropa) dan Jepang. Hubungan yang lebih erat dengan negara-negara itu merupakan pilar utama kebijaksanaan luar negeri RRC. Hubungan semacam itu perlu dijalin, karena negara-negara Barat dan Jepang memiliki kemajuan teknologi dan ketrampilan managerial yang diperlukan bagi modernisasi RRC. Di samping itu, negara-negara Barat dan Jepang penting sebagai partner RRC dalam front persatuan anti Soviet, selama RRC dan Uni Soviet bermusuhan. Akan tetapi RRC akan berusaha mengimbangi penyerapan

1 Lihat Heinrich Bechtoldt, "A Chinese Utopia: Quadripartite Politics", *Aussen Politik*, Vol. 30, No. 2/1979, hal. 128-129

2 Lihat *Asia 1981 Yearbook (FEER)*, hal. 123; lihat juga "The Four Modernization: The 'Chinese Way'", *Issues & Studies*, Vol. XV, No. 5, Mei 1979, hal. 5-6

teknologi Barat dengan tetap mempertahankan identitasnya. Ketiga, hubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga akan terus diadakan meskipun RRC terpaksa mengadakan kompetisi. Sehubungan dengan program modernisasi dan politik pintu terbukanya, RRC kini harus bersaing dengan negara-negara yang sedang berkembang lainnya untuk memperoleh investasi dan bantuan dari negara-negara industri, serta merebut pasaran barang-barang produksi mereka di negara-negara tersebut. Oleh karenanya, meskipun RRC tetap berusaha memelihara hubungan baik dengan negara-negara Dunia Ketiga sesuai dengan teori Tiga Dunianya, RRC sebenarnya sedang mengubah sikapnya dalam memilih sahabat.¹

Di samping pertimbangan ekonomi, alasan politis dan militer merupakan faktor yang dominan dalam kebijaksanaan modernisasi RRC itu. Akibat keterbelakangannya dalam bidang militer/persenjataan, maka sulit bagi RRC untuk menghadapi ancaman atau serangan Uni Soviet (seandainya itu terjadi) terhadap wilayahnya. Oleh sebab itu RRC merasa perlu untuk meningkatkan pertahanannya. Dengan demikian modernisasi di bidang militer merupakan salah satu tujuan utama RRC. Pendekatan terhadap negara-negara Barat merupakan jawaban atas masalah itu. Diharapkan bahwa secara demikian RRC akan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta persenjataan modern. Sementara itu hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya terus dilakukan sebagai "lambang" persahabatan guna merealisasi apa yang disebutnya front persatuan anti Soviet.

STRATEGI GLOBAL RRC

Dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, RRC mengenal apa yang dinamakan strategi ko-eksistensi damai. Strategi ini kemudian dikenal dengan istilah "lima prinsip hidup berdampingan secara damai" yang meliputi: (1) saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara; (2) saling non-agresi; (3) tidak campur tangan dalam masalah-masalah dalam negeri masing-masing; (4) persamaan derajat dan kerja sama atas dasar saling menguntungkan; (5) ko-eksistensi damai. Strategi ini dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengadakan pendekatan terhadap negara-negara lain yang berbeda sistem sosial politiknya di samping revolusi bersenjata sebagaimana disebutkan dalam ajaran Mao, dalam rangka memenangkan pertentangan komunis - kapitalis. Selain itu, dengan berkedok lima prinsip tersebut, RRC mencari simpati negara-negara lain terutama negara-negara berkembang dalam perjuangannya menentang kapitalisme/imperialisme.

1 Lihat Tatsumi Okabe, *loc. cit.*, hal. 256-260

Pada mulanya strategi politik RRC ini dapat diterima baik oleh negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Namun ketika meletus peristiwa G 30S/PKI tahun 1965, yang ternyata didukung RRC, maka banyak negara meragukan kesungguhan RRC dengan kelima prinsip hidup berdampingan secara damai itu. Keadaan ini merupakan salah satu alasan bagi RRC untuk menahan diri dalam melaksanakan ajaran Mao (revolusi dunia), di samping krisis ekonomi dan politik sebagai akibat kegagalan program lompatan jauh ke depan.

Sebagai akibat ancaman Uni Soviet sehubungan dengan krisis perbatasan dan kemungkinan ancaman Amerika Serikat dari perang Vietnam, RRC mulai memperhitungkan juga kepentingan nasionalnya. Perubahan ini sebenarnya baru terjadi setelah Kongres Partai Komunis Cina ke-10 yang berlangsung pada tanggal 24-28 Agustus 1973. Salah satu hasil kongres yang berkaitan dengan politik luar negerinya adalah seruan agar digalang persatuan internasional untuk menentang imperialisme dan neo-kolonialisme negara-negara besar.¹ Para pemimpin RRC rupanya ingin memperbaiki keamanan Cina terhadap ancaman negara lain terutama Uni Soviet. Di samping itu RRC ingin memperbaiki citranya dalam percaturan politik internasional terutama di antara negara-negara berkembang. Dengan seruan itu diharapkan bahwa banyak negara akan bersimpati padanya. Dengan cara demikian RRC berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung dengan musuh utamanya Uni Soviet, tetapi pada waktu yang sama melemahkan atau mengurangi pengaruhnya terutama di negara-negara berkembang. Dalam rangka perebutan pengaruh dengan Uni Soviet itu, RRC berusaha menjalankan politik bermuka dua terhadap negara-negara tersebut, dengan cara menjalin hubungan formal dengan pemerintah di satu pihak, dan di lain pihak mendukung kaum pemberontak komunis seperti terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Kebijaksanaan ini tampaknya belum berubah, walaupun kini mungkin berbeda cara pelaksanaannya. Kalau sebelumnya Partai Komunis Cina mendukung dan membantu gerakan-gerakan komunis di Asia Tenggara baik secara politik dan moral maupun logistik, kini hubungan itu terbatas pada bidang "politik dan moral" seperti dinyatakan oleh PM baru RRC Zhao Ziyang dalam kunjungannya ke beberapa negara Asia Tenggara bulan Agustus 1981.² Meskipun demikian, dukungan tersebut masih mempunyai arti penting karena sekurang-kurangnya mengobarkan semangat juang kaum pemberontak komunis tersebut. Dan ini penting bagi RRC karena menjaga kelangsungan pengaruhnya atas mereka. RRC menyadari keterbatasan kemampuannya dan kuatir bahwa seandainya ia menghentikan dukungannya bagi mereka, partai-partai komunis Asia Tenggara akan jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet dan Vietnam. Oleh karenanya RRC kiranya akan tetap berusaha memainkan peranannya itu.

1 Lihat Clara Joewono (ed.), *Indonesia dan Dunia Internasional 1974*, (Jakarta: CSIS, Juni 1974), hal. 284

2 Lihat *Kompas*, 10 Agustus 1981

Beberapa tahun terakhir ini tampak bahwa seluruh diplomasi RRC ditujukan untuk membentuk suatu front persatuan internasional yang seluas mungkin guna melawan usaha ekspansionis dan hegemonis Uni Soviet. Hal ini terungkap dengan jelas dalam kunjungan Deng Xiaoping ke AS dan Jepang (awal tahun 1979), kunjungan Hua Guofeng ke sejumlah negara Eropa (1979) dan ke Jepang (akhir Mei dan awal Juni 1980) di mana ia mengadakan pertemuan dengan bekas Presiden AS Jimmy Carter, dan kunjungan Geng Biao (Wakil PM) ke AS dan Jepang. Dalam pertemuan mereka dengan pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut, mereka mengusulkan agar AS, Eropa Barat dan Jepang memperbesar anggaran belanja militer mereka, meningkatkan persenjataan mereka dan bersatu untuk menentang hegemoni Uni Soviet.¹

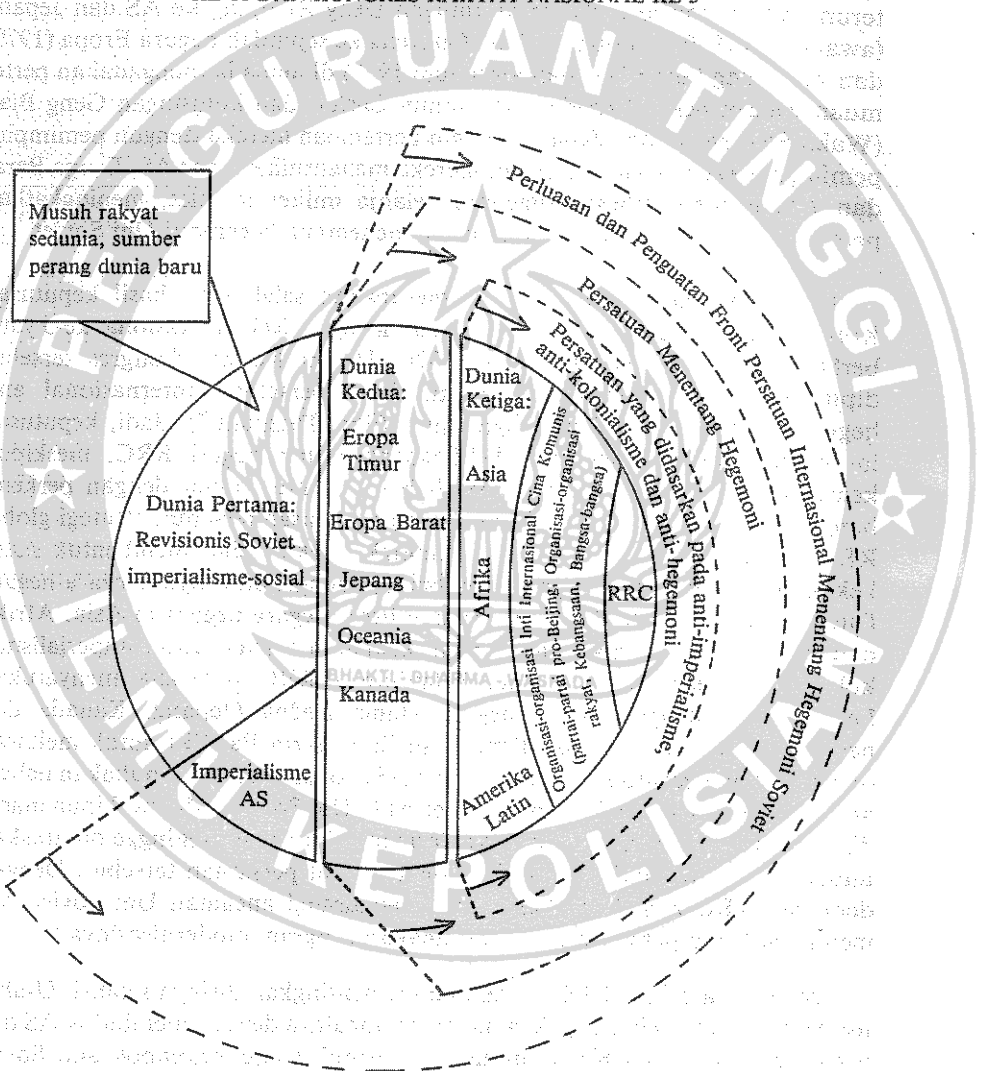
Usul yang disebut terakhir itu merupakan salah satu hasil keputusan Kongres Nasional Partai (CCP) ke-11 dan Kongres Rakyat Nasional ke-5 yang berlangsung pada Pebruari-Maret 1978. Dalam Kongres-kongres tersebut diputuskan untuk membentuk suatu front persatuan internasional anti hegemoni berdasarkan Teori Tiga-Dunia (lihat Diagram I). Jadi, keputusan ini merupakan landasan bagi kebijaksanaan luar negeri RRC, meskipun kemudian mengalami beberapa perubahan tertentu, sesuai dengan perkembangan situasi internasional. Berdasarkan keputusan tersebut, strategi global RRC adalah memperoleh sebanyak mungkin sekutu dan membentuk suatu kekuatan internasional dengan rezim Beijing sebagai pusatnya. Negara-negara Dunia Ketiga (yang terdiri dari sebagian besar negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin) dianggap sebagai kekuatan utama lawan imperialisme, kolonialisme dan hegemonisme. Selanjutnya RRC berusaha menyatukan kekuatan itu dengan negara-negara Dunia Kedua (Jepang, Kanada dan negara-negara lain di Eropa Timur dan Barat serta Pasifik) untuk melawan dua kekuatan hegemoni, Uni Soviet dan AS. Akan tetapi dikemukakan bahwa ancaman perang dunia baru bersumber pada Uni Soviet. AS, meskipun masih dianggap musuh, kurang berbahaya daripada Uni Soviet, sehingga diputuskan untuk mengambil hatinya agar ikut dalam front persatuan tersebut. Dengan demikian RRC mengharapkan dapat mengurangi ancaman Uni Soviet dan mendapat kesempatan untuk melaksanakan program modernisasinya.²

Dalam strategi itu RRC terlampaui mementingkan dirinya sendiri. Usaha-usahanya untuk melindungi keamanan nasionalnya dengan membujuk AS dan negara-negara Dunia Kedua untuk membentuk suatu kelompok anti Soviet menimbulkan kecurigaan mereka. Selain itu keinginannya untuk memimpin negara-negara Dunia Ketiga mengungkapkan ambisinya. Sementara itu

1 Lihat Heinrich Bechtoldt, *loc. cit.*, hal. 131; lihat juga *Antara*, 29 Mei 1980/A; *Antara*, 5 Juni 1980/B

2 Lihat Tokuzo Shimizu, "The Revision of the Chinese Communist 'State' Strategy - Its Successes and Failures", *Issues & Studies*, Vol. XV, No. 5, Mei 1979, hal. 38-39

DIAGRAM I
STRATEGI GLOBAL YANG DISETUJUI PADA KONGRES NASIONAL PARTAI (CCP)
KE-11 DAN KONGRES RAKYAT NASIONAL KE-5*



*) Diambil dari Tokuzo Shimizu, *loc. cit.*, hal. 51

hubungan baiknya dengan negara-negara Dunia Ketiga belum meyakinkan, terutama karena kebijaksanaan muka duanya. Oleh karenanya itu usaha-usahanya untuk mencari simpati dari negara-negara tersebut kurang berhasil. Kenyataan ini rupanya disadari sehingga RRC mencoba untuk mengubah pola strateginya dan membentuk kembali kekuatan pro-Beijing dengan jalan mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara Sosialis (seperti Yugoslavia, Rumania dan Korea Utara), dan mengalihkan perhatian dalam kebijaksanaan luar negerinya ke negara-negara Dunia Kedua. Hal yang terakhir ini terdorong oleh keinginannya untuk mempercepat pelaksanaan program modernisasinya.

Beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan kebijaksanaan luar negeri RRC yang terjadi pada tahun 1978 antara lain adalah Persetujuan Perdagangan dengan Masyarakat Eropa yang ditandatangani pada 3 April 1978 dan mulai berlaku pada 1 Juni 1978. Menyusul kemudian penandatanganan Perjanjian Perdamaian, Persahabatan dan Kerja Sama dengan Jepang di Beijing 12 Agustus 1978 dan ratifikasinya di Tokyo pada 20 Oktober 1978. Perjanjian ini antara lain memuat sebuah pasal anti hegemoni (pasal 2).¹ Dengan adanya hubungan seperti ini, RRC mengharapkan dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya bagi pelaksanaan program modernisasinya baik dari Masyarakat Eropa maupun Jepang. Di samping itu, dengan dimuatnya pasal anti hegemoni dalam perjanjian dengan Jepang, RRC rupanya mengharapkan agar Jepang bersekutu dengannya guna melawan hegemoni (Uni Soviet). Persengketaan antara Jepang dan Uni Soviet mengenai beberapa pulau di sebelah utara Jepang yang diduduki Uni Soviet setelah PD II, kemungkinan dimanfaatkan RRC untuk menarik Jepang ke dalam orbit politiknya. Sementara itu RRC terus berusaha memulihkan hubungannya dengan AS berdasarkan Komunique Shanghai tahun 1972. Persaingannya dengan Uni Soviet tidak saja mendorong RRC untuk memulihkan hubungannya dengan AS, tetapi juga membentuk suatu aliansi RRC - AS yang kuat untuk melawan Uni Soviet, walaupun masalah Taiwan harus diselesaikan dahulu.

Setelah masalah Taiwan dapat diselesaikan, AS dan RRC mencapai kata sepakat dan secara bersamaan mengumumkan di Washington dan Beijing pada tanggal 15 Desember 1978, bahwa kedua negara memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik pada 1 Januari 1979. AS mengakui RRC sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Cina dan mengakhiri hubungan diplomatiknya dengan Taiwan sehingga hanya tinggal hubungan ekonomi dan kebudayaan. Selain itu AS mengakhiri pakta pertahanan bersama dengan Taiwan (1954), yang masa berlakunya berakhir pada akhir tahun 1979, dan menarik sisa-sisa personal militernya dari negara itu.² Selain karena masalah

1 Lihat Sudibjo (ed.), *Indonesia dan Dunia Internasional 1979* (Jakarta: CSIS, 1980), hal. 520-521

2 Lihat *Antara*, 16 Desember 1978/B; *Sinar Harapan*, 16 Desember 1978

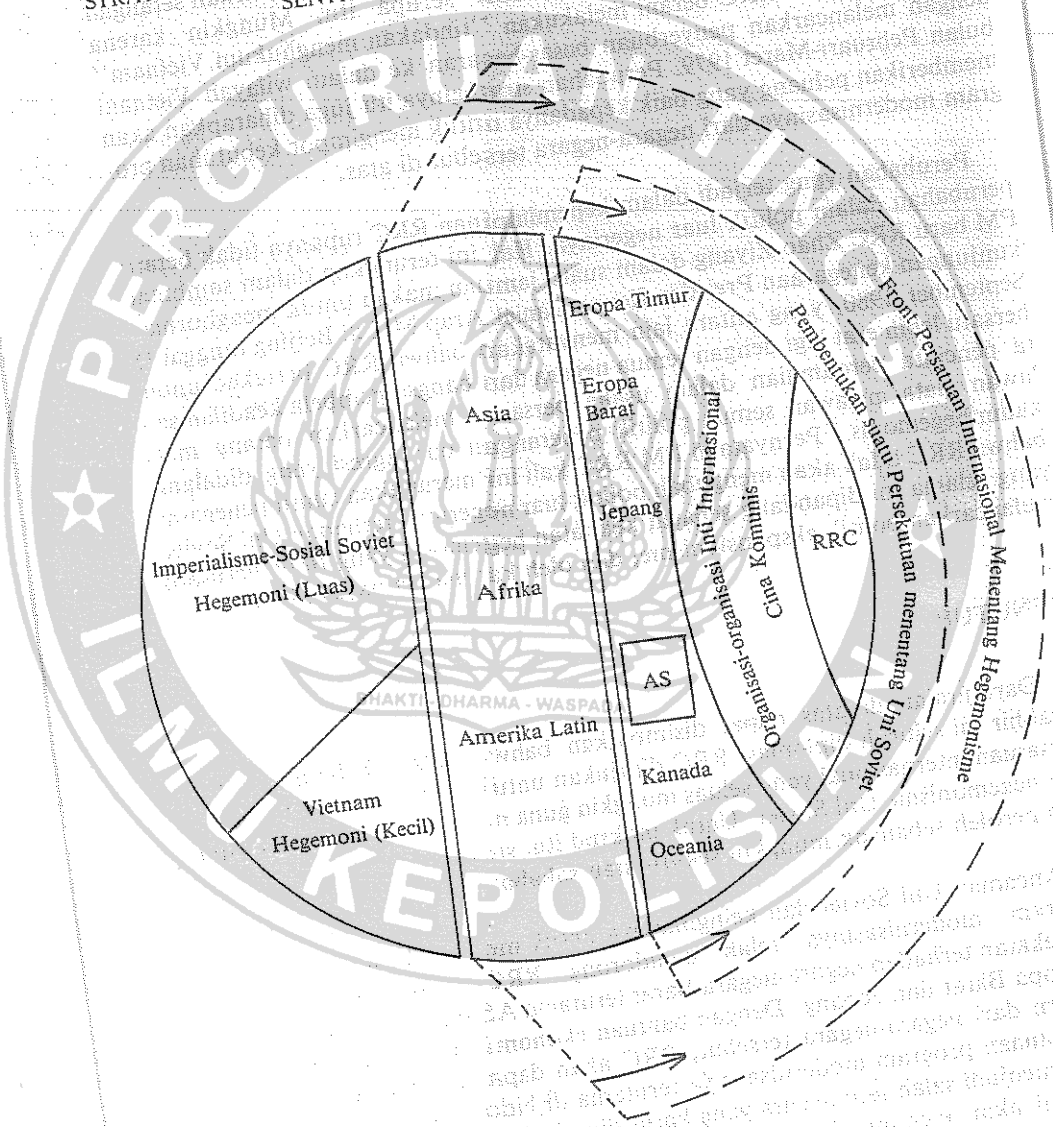
Taiwan telah dapat diselesaikan, tampaknya RRC mempercepat pembukaan hubungan diplomatiknya dengan AS setelah Uni Soviet dan Vietnam menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama pada 3 Nopember 1978. Hal ini mencemaskan RRC yang menganggap perjanjian itu sebagai suatu basis kerja sama militer yang ditujukan terhadap Cina. Oleh karenanya RRC merasa perlu untuk segera menjalin hubungan diplomatik dengan AS dengan harapan bahwa Uni Soviet akan segan untuk melakukan suatu tindakan (militer) terhadap Cina yang dekat dengan AS. Setelah Vietnam yang didukung Uni Soviet melancarkan invasi militer ke Kamboja dan menggulingkan Pemerintah Kamboja (Pol Pot Cs) yang pro-Beijing, RRC merasa sangat terpukul dan semakin cemas bahwa Uni Soviet mulai mengepungnya dari bagian selatan wilayah negaranya. Untuk mengatasi atau mengurangi ancaman itu, tak ada pilihan bagi RRC selain lebih mendekatkan dirinya dengan AS dan sekutu-sekutunya. Dan dalam rangka itulah Deng Xiaoping (yang saat itu berkedudukan sebagai Wakil Ketua PKC merangkap Wakil PM, dan kini hanya Wakil Ketua PKC) mengadakan kunjungan resmi ke AS (29 Januari-5 Pebruari 1979). Pada kesempatan itu Deng mengusulkan agar AS, Eropa, Jepang dan RRC serta negara-negara Dunia Ketiga lainnya bersatu tanpa membentuk pakta atau persekutuan untuk melawan hegemonisme Uni Soviet dan melindungi perdamaian, stabilitas serta keamanan dunia. Selain itu, dalam pernyataan pers bersama dengan pemimpin AS (Cq. Jimmy Carter), Deng berhasil memasukkan klausula anti hegemoni, yang menyatakan bahwa kedua pemimpin menentang semua usaha suatu negara atau kelompok negara untuk memperoleh hegemoni atau dominasi atas negara-negara lainnya.¹ Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan kekuatiran RRC terhadap ancaman Uni Soviet terhadap keamanan negaranya. Di samping itu RRC rupanya ingin memanfaatkan persaingan AS - Uni Soviet untuk mengajak AS memasuki orbit politiknya.

Dengan meningkatnya ancaman Uni Soviet dan dipulihkannya hubungan dengan AS, RRC merasa perlu untuk mengubah lagi strateginya dalam rangka pembentukan front persatuan internasional anti hegemoni. Perubahan ini disetujui pada Sidang Pleno ketiga Komite Sentral Partai (CCP), (lihat Diagram II). RRC rupanya bermaksud melibatkan AS, Jepang, Eropa, Kanada dan negara-negara lain di kawasan Pasifik dalam persekutuan menentang hegemoni Uni Soviet (dan Vietnam). AS, Jepang dan Eropa dianggap sebagai kunci dalam front persatuan tersebut, sedangkan peranan negara-negara Dunia Ketiga menjadi kurang penting.² Dengan merangkul negara-negara Dunia Kedua dan AS, RRC berharap dapat menangkis ancaman Uni Soviet terhadap keamanannya dan pada waktu yang sama mengurangi pengaruh Uni Soviet di negara-negara Dunia Ketiga. Jadi, RRC memainkan

1 Lihat *Antara*, 1 Pebruari 1979/B; *ibid.*, 2 Pebruari 1979/A

2 Lihat Tokuzo Shimizu, *loc. cit.*, hal. 41-42

DIAGRAM II
 STRATEGI GLOBAL YANG DISETUJUI PADA SIDANG PLENO KETIGA KOMITE
 SENTRAL PARTAI KOMUNIS (CCP) KE-11*



*) Diambil dari Tokuzo Shimizu, *loc. cit.*, hal. 52

kartu negara-negara tersebut terutama AS dalam pertentangannya dengan Uni Soviet. RRC rupanya yakin bahwa dengan adanya hubungan yang baik (erat) dengan AS, Uni Soviet harus berpikir dua kali sebelum melancarkan serangan terhadapnya kalau mempunyai maksud serupa itu. Mungkin karena keyakinannya itu RRC berani melakukan "tindakan menghukum Vietnam" dengan melancarkan penyerbuan besar-besaran ke dalam wilayah Vietnam bulan Pebruari-Maret 1979. Perubahan strateginya itu juga diharapkan akan memberikan peluang yang baik kepadanya untuk mengimpor kebutuhan program modernisasinya dari negara-negara tersebut di atas.

Perubahan yang terjadi dalam kepemimpinan RRC rupanya tidak berarti perubahan dalam politik luar negerinya. Hal ini terungkap dalam sambutan PM baru RRC Zhao Ziyang dalam suatu jamuan makan untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Kenya Daniel Arap Moi di Beijing tanggal 15 September 1980, yang antara lain menyatakan bahwa RRC bertekad untuk bersatu lebih erat lagi dengan semua negara dan bangsa pembela keadilan serta pencinta perdamaian dalam usaha bersama melancarkan perang mata lawan mata melawan semua politik peperangan dan agresi yang didalangi kaum hegemonis.¹ Pernyataan PM RRC kali ini merupakan suatu penegasan bahwa RRC tidak akan mengubah politik luar negerinya terhadap Uni Soviet, yang selama ini dipandang sebagai kekuatan hegemonis yang terus berusaha melancarkan politik ekspansionisme, dan oleh karenanya harus dilawan.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini seluruh diplomasi RRC ditujukan untuk membentuk suatu front persatuan internasional yang seluas mungkin guna menentang ekspansionisme dan hegemonisme Uni Soviet. Untuk maksud itu, strategi global RRC adalah memperoleh sebanyak mungkin sekutu atau sahabat.

Ancaman Uni Soviet dan keinginannya untuk mempercepat pelaksanaan program modernisasinya telah mendorong RRC untuk mengadakan pendekatan terhadap negara-negara Barat terutama AS dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat dan Jepang. Dengan bantuan ekonomi, militer dan teknologi modern dari negara-negara tersebut, RRC akan dapat mempercepat proses pelaksanaan program modernisasinya terutama di bidang militer sehingga ia dapat menjadi salah satu negara yang harus diperhitungkan. Selanjutnya keadaan ini akan memungkinkannya mencapai tujuannya. Oleh karenanya ia berusaha menggeser beban konfrontasinya dengan Uni Soviet untuk semen-

¹ Lihat *Kompas*, 18 September 1980

tara ini ke pundak AS dan sekutu-sekutunya. Hal ini tampak dari usaha-usaha RRC untuk membentuk front persatuan anti hegemoni (Soviet), sementara RRC sendiri memperkuat diri dengan bantuan dari negara-negara tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan terhadap Barat merupakan strategi politik dan militer jangka panjang RRC, dan bukan semata-mata dimaksudkan untuk menunjang pembangunan ekonominya. Dan sambil bergabung dengan kelompok negara-negara Barat, RRC tetap memperjuangkan tujuan lama politiknya terhadap negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, yaitu merebut kepemimpinan Dunia Ketiga dalam rangka menciptakan masyarakat komunis. Untuk itu RRC merasa "berkewajiban" untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada gerakan-gerakan kemerdekaan dan pemberontak-pemberontak komunis di semua negara termasuk Asia Tenggara.

RRC menganggap kerja sama dengan negara-negara Barat terutama AS dan Jepang, sebagai unsur penting dalam suatu front persatuan anti hegemoni, karena kegiatan mereka dalam bidang politik, ekonomi dan militer perlu disatukan guna mengawasi perkembangan di kawasan Asia dan Pasifik, serta memperbesar pengaruhnya di kawasan tersebut. RRC mendukung peningkatan militer Jepang dengan harapan bahwa suatu Jepang yang kuat dalam bidang militer dan bersahabat dengan RRC (meskipun Jepang menolak untuk bersekutu secara militer dengan RRC), akan memberikan keuntungan strategi militer kepadanya. Untuk maksud yang sama RRC menghendaki agar Jepang mempertahankan persekutuan militernya dengan AS. Sementara itu RRC rupanya ingin memanfaatkan strategi global AS di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan yang berusaha untuk menjaga segala kemungkinan, dan untuk menangkis segala bentuk ancaman Uni Soviet di manapun. RRC mengharapkan bahwa AS akan memainkan suatu peranan positif di kawasan Asia-Pasifik, terutama melenyapkan pengaruh Uni Soviet, sehingga memungkinkan RRC memainkan peranannya sendiri.

Dan mengenai hubungannya dengan AS, meskipun RRC mengharapkan suatu bentuk kerja sama yang langsung selain persekutuan untuk menentang Uni Soviet, hal ini rupanya masih terhalang oleh kekuatiran akan timbulnya reaksi yang berlebihan dari Uni Soviet. Di samping itu, masalah Taiwan mungkin masih akan dipersoalkan lagi di masa mendatang. Dan, dilihat dari sudut pandangan RRC berdasarkan Teori Tiga Dunianya (meskipun menurut mereka terjadi perubahan), AS sebenarnya tergolong Dunia I bersama dengan Uni Soviet. Sesuai dengan teori itu, AS bukan sahabat, tetapi musuhnya. Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh RRC sekarang ini mungkin hanya dimaksud sebagai taktik untuk mencapai tujuan-tujuannya baik ekonomi dan politik maupun militer.

Suatu peningkatan hubungan kerja sama antara AS, Jepang dan RRC akan mengubah perimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik, terutama jika kerja sama itu menjurus kepada persekutuan militer. Persekutuan militer Jepang-AS dan Perjanjian Perdamaian, Persahabatan dan Kerja Sama RRC-Jepang sekarang ini bisa menjurus ke arah itu. Kemungkinan seperti ini tampak juga dari komunike bersama PM Jepang Zenko Suzuki (yang berkunjung ke AS tanggal 7 dan 8 Mei 1981) dengan Presiden AS Ronald Reagan yang antara lain menyebutkan adanya aliansi Jepang dan AS (yang menimbulkan pertentangan di dalam negeri Jepang), dan kesepakatan mereka untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama masing-masing dengan RRC demi kepentingan mereka pada perdamaian dan kemantapan di Asia.¹ Keputusan Pemerintah AS untuk menjual senjata-senjata ofensif kepada RRC merupakan suatu perkembangan baru dalam hubungan kedua negara itu, walaupun untuk sementara waktu ini RRC mungkin belum mampu untuk membeli, menjalankan dan memelihara peralatan mutakhir dari AS. Perkembangan hubungan ini penting artinya bagi strategi politik luar negeri RRC terutama jika dikaitkan dengan strategi global AS dan komunike bersama Jepang - AS tersebut di atas. Hal ini akan dapat dimanfaatkan RRC dalam persaingannya dengan Uni Soviet guna memenuhi ambisinya. Namun tidaklah jelas apakah kerja sama seperti itu yang dimaksudkan RRC sebagai salah satu bentuk front persatuan anti hegemoni Uni Soviet. Perkembangan hubungan di antara negara-negara tersebut pada waktu mendatang mungkin dapat memberikan jawaban. Selain itu kemungkinan bahwa seruan RRC untuk membentuk front persatuan anti hegemoni Soviet itu hanya merupakan taktik RRC untuk memperkuat diri dengan bantuan negara-negara Barat, dan pada saatnya nanti RRC mungkin akan membentuk hegemoninya sendiri.

Bagi negara-negara Asia Tenggara khususnya ASEAN, suatu peningkatan hubungan kerja sama RRC dengan negara-negara Barat terutama AS dan Jepang menimbulkan kekuatiran karena hanya akan menguntungkan strategi mereka masing-masing. Taktik memainkan "kartu AS (dan sekutu-sekutunya)" oleh RRC atau sebaliknya dalam rangka persaingan mereka dengan Uni Soviet, kemungkinan akan memperburuk situasi di kawasan Asia-Pasifik. Dan, walaupun untuk saat ini RRC belum merupakan ancaman nyata terhadap keamanan negara-negara ASEAN, namun kebijaksanaan bermuka duanya tetap merupakan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh karenanya negara-negara ASEAN perlu terus meningkatkan ketahanan nasional masing-masing karena tanggungjawab terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan bukan tergantung atau ditentukan negara lain.

¹ Lihat *Antara*, 9 Mei 1981; lihat juga Edwin Candra, "Bahaya Komunis di Daerah Pasifik & Strategi Global Amerika Serikat", *Sinar Harapan*, 5 Oktober 1981, hal. VIII